

ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMBANGUNAN
PEMERINTAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI
JAWA TIMUR

SKRIPSI



Oleh :

SANDRA EKA WIJAYA

0911010036

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL " VETERAN"
JAWA TIMUR

2013

SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI JAWA TIMUR

Disusun oleh :

SANDRA EKA WIJAYA

0911010036

Telah dipertahankan di hadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi Progdi
Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Pada tanggal 13 Juni 2013

PEMBIMBING

TIM PENGUJI

Ketua

DR. IGNATIA MARTHA, SE., ME.

NIP. 196703011991032001

DR. IGNATIA MARTHA, SE., ME.

NIP. 196703011991032001

Sekretaris

DR. MUCHTOLIFAH, SE., MP.

NIP. 195805091987032001

Anggota

DR. SRI MULJANINGSIH, SE., MP.

NIP. 195706031989032001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

DR. DHANI ICHSANUDDIN NUR, SE., MM.

NIP. 196309241989031001

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah rabbil ‘alamin terucap ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan Kekuatan-Nya sehingga dengan segala keterbatasan waktu, tenaga, pikiran dan keberuntungan yang dimiliki peneliti, akhirnya peneliti dapat menyelesaikan Skripsi “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pembangunan Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Timur” tepat waktu.

Adapun maksud penyusunan Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat akademis guna melanjutkan penelitian sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi. Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini masih banyak kekurangan, walaupun demikian peneliti berupaya menyelesaikannya sebaik mungkin.

Didalam penyusunan Skripsi ini peneliti banyak menghadapi kendala dan masalah, akan tetapi atas bantuan dan dorongan dari Ibu Dr. Ignatia Martha Hendrati, SE., ME. selaku Dosen Pembimbing Skripsi dan banyak pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Yaitu:

1. Bapak Dr., Ir. Teguh Sudarto, MP. Selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Dr. Dhani Ichsanuddin Nur, SE., MM. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

3. Ibu Dra.Ec. Niniek Imaningsih, MP. Selaku Ketua Program Studi Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Bapak dan Ibu Pengajar Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Kedua orang tua dan saudara – saudara kami yang selalu memberikan dukungan dan doa.
6. Rekan – rekan angkatan 2009 Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, atas segala bantuan dan dukungannya.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu – per satu yang telah banyak membantu dalam penyelesaian Skripsi

Akhir kata, semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya Skripsi ini, sehingga dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya oleh berbagai pihak yang berkepentingan.

Surabaya, 10 Januari 2013

Peneliti

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI | iii |
| DAFTAR TABEL..... | vi |
| DAFTAR GAMBAR | vii |
| DAFTAR LAMPIRAN | viii |
| ABSTRAK | ix |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1.Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2. Perumusan Masah | 8 |
| 1.3.Tujuan Penelitian | 8 |
| 1.4.Manfaat Penelitian | 9 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 10 |
| 2.1.Hasil – Hasil Penelitian Terdahulu | 10 |
| 2.2. Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu | 17 |
| 2.3.Landasan Teori | 17 |
| 2.2.1 Teori Pengeluaran Pembangunan..... | 17 |
| 2.2.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi | 26 |
| 2.4.Kerangka Pemikiran..... | 36 |
| 2.5.Hipotesis..... | 36 |

| | |
|---|----|
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN | 37 |
| 3.1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel | 37 |
| 3.1.1. Definisi Operasion..... | 37 |
| 3.2. Teknik Pengumpulan Data | 42 |
| 3.3. Teknik Analisis dan Uji Hipotesis | 42 |
| 3.3.1. Teknik Analisis | 42 |
| 3.3.2. Uji Hipotesis..... | 43 |
| 3.3.3. Pendekatan Regresi dengan asumsi BLUE..... | 48 |
| BAB IV HASIL PELITIAN DAN PEMBAHASAN | 52 |
| 4.1. Diskripsi Obyek Penelitian..... | 52 |
| 4.1.1 Letak Geografis | 52 |
| 4.1.2 Ketenaga Kerjaan | 53 |
| 4.1.3 Keuangan Daerah | 54 |
| 4.1.4 Perdagangan | 55 |
| 4.1.5 Pendapatan Regional | 56 |
| 4.1.6 Pertumbuhan Ekonomi | 56 |
| 4.2. Diskripsi Hasil Penelitian..... | 57 |
| 4.2.1 Perkembangan Belanja Bantuan Sosial | 58 |
| 4.2.2 Perkembangan Belanja Modal | 59 |
| 4.2.3 Perkembangan Pembiayaan Daerah | 60 |
| 4.2.4 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi..... | 61 |
| 4.3. Analisis Dan Pengujian Hipotesis..... | 63 |

| | |
|---|--------|
| 4.3.1 Analisis Asumsi Regresi Klasik (BLUE) | 63 |
| 4.3.2 Analisis dan Pengujian Hipotesis | 68 |
| 4.3.3 Uji F (Anova) | 70 |
| 4.3.4 Uji Hipotesis (Uji t) | 72 |
| 4.3.5 Pembahasan..... | 77 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 80 |
| 5.1 Kesimpulan..... | 80 |
| 5.2 Saran | 81 |

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1 : Pengeluaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur | 6 |
| Tabel 2 : Perumbuha Ekonomi Provinsi Jawa Timur | 7 |
| Tabel 3 : Mapping Jurnal Penelitian | 12 |
| Tabel.4. Perkembangan Dana Bantuan Soaial Triwulan Jawa Timur | 58 |
| Tabel.5. Perkembangan Dana Belanja Modal Triwulan Jawa Timur | 59 |
| Tabel.6. Perkembangan Dana Pembiayaan Daerah Triwulan Jawa Timur..... | 61 |
| Tabel.7. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Triwulan Jawa Timur | 62 |
| Tabel. 8. Tes Multiplier..... | 66 |
| Tabel. 9. Korelasi | 67 |
| Tabel.10. Hasil Analisis Variabel..... | 68 |
| Tabel.11. Analisis Varian (ANOVA) | 70 |
| Tabel. 12. Uji Analisis secara Parsial (Uji t)..... | 72 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 1. Kerangka Penelitian | 35 |
| Gambar 2. Kerangka Pemikiran..... | 36 |
| Gambar 3. Kurva Distribusi F | 46 |
| Gambar 4. Kurva Distribusi T | 48 |
| Gambar 5. Kurva Durbin Watsen | 50 |
| Gambar 6. Kurva Statistik Durbin Watsen..... | 65 |
| Gambar 7. Kurva Distribusi Kriteria Penerimaan/Penolakan Hipotesis | 71 |
| Gambar 8. Kurva Distribusi Hasil Analisis Secara Partial..... | 73 |
| Gambar 9. Kurva Distribusi Hasil Analisis Secara Partial..... | 75 |
| Gambar 10. Kurva Distribusi Hasil Analisis Secara Partial | 76 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|------------|---|
| Lampiran 1 | Data Input |
| Lampiran 2 | Hasil Analisis Regresi Linear Berganda, Model Summary |
| Lampiran 3 | Anova dan Coefficient |
| Lampiran 4 | Collnearity Diagnostic dan Residuals Statistics |
| Lampiran 5 | Correlation |
| Lampiran 6 | Pengujian nilai F |
| Lampiran 7 | Pengujian Nilai t |
| Lampiran 8 | Tabel Durbin-Watsen |

ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI JAWA TIMUR

Oleh :

SANDRA EKA WIJAYA

Abstraksi

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan prosesnya yang berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi yang dilihat dari Pendapatan daerah Pendapatan Daerah. Dari notasi yang sangat sederhana bila ditata kembali dalam rumus Pendapatan Daerah menjadi Pendapatan Daerah terdiri dari penjumlahan pengeluaran otonom ditambah dengan ekspor dikali Multiplier regional Kenaikan (penurunan) pengeluaran pemerintah akan menaikkan (menurunkan) pendapatan nasional.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis pengaruh pengeluaran pembangunan pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur untuk mengetahui variabel bebas mana yang berpengaruh paling dominan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data time series pada tahun TW I 2009 sampai dengan TW IV 2012. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dan variabel yang digunakan adalah Bantuan Sosial (X_1), Belanja Modal (X_2), Pembiayaan Daerah (X_3), Dan Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur (Y) sebagai variabel terikatnya.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Bantuan Sosial (X_1), Belanja Modal (X_2), Pembiayaan Daerah (X_3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur (Y). Ditunjukkan dengan $F_{hitung} = 3,513 > F_{tabel} = 3,49$. Sedangkan secara parsial, variabel Bantuan Sosial (X_1) tidak berpengaruh pada variabel terikat. Belanja Modal (X_2) berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur (Y). Sedangkan Pembiayaan daerah (X_3) tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur (Y), pada level 5% dan signifikan pada level 10%..

Kata kunci : Bantuan Sosial, Belanja Modal, Pembiayaan Daerah, dan Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tujuan suatu negara adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Salah satu ukuran pertumbuhan ekonomi adalah pendapatan nasional. Pendapatan nasional suatu negara dapat menunjukkan seberapa besar aktivitas perekonomian secara keseluruhan. Konsep pendapatan nasional adalah ukuran yang paling sering dipakai sebagai indikator pertumbuhan ekonomi namun bukan satu-satunya indikator pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses, bukan merupakan suatu gambaran ekonomi pada suatu periode tertentu, ada perkembangan atau perubahan dan penggunaan waktu Boediono, (2008).

Menurut Samuelson dan Nordhaus (2005) ada empat faktor sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor tersebut adalah (1) sumberdaya manusia, (2) sumberdaya alam, (3) pembentukan modal, dan (4) teknologi. Pengeluaran pemerintah berperan dalam pembentukan modal melalui pengeluaran pemerintah di berbagai bidang seperti sarana dan prasarana. Pembentukan modal di bidang sarana dan prasarana ini umumnya menjadi social overhead capital (SOC) yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. SOC ini sangat penting karena pihak swasta tidak akan mau menyediakan berbagai fasilitas publik, namun tanpa adanya fasilitas publik ini maka pihak swasta tidak berminat untuk menanamkan modalnya.

Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan akan terdorong naik dengan adanya berbagai fasilitas publik. Pengeluaran pemerintah yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu alat kebijakan fiskal pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah dapat menggunakannya untuk mengelola perekonomian negara. APBD pada perkembangannya telah mengalami banyak perubahan struktur. APBD saat ini menggunakan sistem anggaran berbasis kinerja berdasarkan UU No.1 tahun 2006.

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi perekonomian daerah, beberapa di antara faktor tersebut adalah pengeluaran pembangunan pemerintah dalam hal pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan ketersediaan sarana dan prasarana (infrastruktur). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan antara pengeluaran pembangunan pemerintah pada sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dengan perekonomian daerah.

Secara empiris maupun ekonomi mengenai hubungan antara pengeluaran konsumsi pemerintah dan pengeluaran investasi terhadap pertumbuhan ekonomi, maka dapat disimpulkan bahwa Pengeluaran konsumsi pemerintah dan pengeluaran investasi pemerintah di Indonesia mempunyai kecenderungan untuk meningkat setiap tahunnya. Terdapat hubungan yang positif pengeluaran konsumsi pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi pada periode penelitian. Hal ini dikarenakan pengeluaran konsumsi yaitu pengeluaran rutin negara dalam hal ini belanja pegawai yang mencakup gaji dan pensiun, tunjangan serta belanja barang-barang dalam negeri, dana rutin daerah dan pengeluaran rutin lainnya yang berdampak konsumsi pegawai atau masyarakat terhadap barang-barang meningkat

yang kemudian menaikkan fungsi konsumsi yang menyumbang kontribusi terhadap bruto nasional dan pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran investasi pemerintah mempunyai dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena pengeluaran investasi pemerintah dimaksudkan guna menunjang pertumbuhan ekonomi dan mendorong berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat. Dan anggaran pembangunan dialokasikan terutama untuk membiayai proyek-proyek yang tidak dapat dibiayai sendiri oleh masyarakat. Darma Rika Swaramarinda dkk, (2011)

Penelitian-penelitian terdahulu masih memperdebatkan hubungan pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi. Perbedaan hubungan yang terjadi pada penelitian terdahulu terkait dengan perbedaan kondisi tiap-tiap daerah yang diteliti.

Kuangan Negara meliputi seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan semua hak dan kewajiban Negara. Dan seluruh rangkaian kegiatan ini memiliki akibat-akibat keuangan sehingga memerlukan adanya suatu perencanaan keuangan yang cermat (UU Nomor 47 Tahun 2009).

Salah satu asas pembangunan daerah adalah desentralisasi, menurut ketentuan umum UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perwujudan dari asas desentralisasi adalah berlakunya otonomi daerah. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberi kewenangan mengurus dan

mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah pusat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pemerintah provinsi mengalokasikan sebagian besar dananya melalui belanja bagi hasil dan bantuan keuangan bagi daerah bawahan untuk sektor-sektor sosial, pendidikan, kesehatan dan lainnya. Di tingkat kabupaten/kota, belanja terbesar dialokasikan kepada belanja pegawainya. Belanja pendidikan merupakan sektor utama alokasi belanja pemerintah kabupaten/kota. Namun, perlu diteliti lebih lanjut alokasi belanja pendidikan yang cukup besar dan meningkat di kabupaten/kota. Alokasi belanja daerah untuk sektor infrastruktur masih minim, khususnya di tingkat kabupaten/kota. Pemerintah kabupaten/kota perlu mengkaji lebih lanjut alokasi belanja sektoral, khususnya untuk sektor infrastruktur, sebagai salah satu sektor yang menjadi isu utama di Jawa Timur. BPS, (2011).

Secara keseluruhan, belanja publik di Jawa Timur, mencakup Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota mengalami peningkatan. Pertumbuhan belanja tersebut cukup stabil secara riil selama 11 persen dari Rp. 34 triliun tahun 2006 menjadi Rp. 50,2 triliun tahun 2010. Belanja publik di Jawa Timur 74 persen dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota, sementara belanja pemerintah pusat dan pemerintah provinsi masing-masing hanya mengelola 8 persen dan 18 persen. Porsi Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan jasa pemerintah provinsi hampir sama pada tahun 2009 masing-masing sebesar Rp. 1,5 triliun dan Rp. 1,9 triliun. Porsi belanja pegawai pada belanja pemerintah provinsi stabil sebesar 20 persen selama

periode 2006-2010. Porsi belanja barang dan jasa pemerintah provinsi sempat mengalami penurunan cukup signifikan pada tahun 2007 dan setelah itu stabil kurang lebih 25 persen total belanja provinsi. Belanja barang dan jasa provinsi naik dari Rp. 2 triliun menjadi Rp. 2,5 triliun. Sebagian besar belanja pemerintah provinsi Jawa Timur dialokasikan untuk belanja lain-lain, yaitu sebesar 45 persen pada tahun 2010. Belanja lain-lain ini meningkat cukup signifikan dari Rp. 2,1 triliun pada tahun 2006 menjadi Rp. 4,4 triliun pada tahun 2010. Hampir seluruh belanja lain-lain pemerintah provinsi ini dialokasikan untuk belanja bagi hasil dan bantuan keuangan ke daerah bawahan (kabupaten/kota) untuk sektor-sektor pelayanan publik seperti sosial, pendidikan, BPS, (2011)

Pengeluaran Pemerintah atau yang disebut Belanja Daerah adalah Bagian ini menunjukkan perkembangan total belanja dalam periode 5 (lima) tahun. Selain itu, akan ditunjukkan pula perubahan dalam jenis belanja sehingga dapat diketahui jika ada satu komponen yang berubah relatif terhadap komponen lain. Untuk pemda di Indonesia, klasifikasi belanja secara ekonomi dibagi kedalam 10 (sepuluh) jenis, yaitu belanja pegawai, barang dan jasa, modal, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes, belanja bantuan keuangan kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes, dan belanja tidak terduga. Belanja pegawai, barang jasa dan modal merupakan tiga jenis belanja dengan persentase terbesar dibanding jenis belanja lainnya. Oleh karena itu, dalam bagian ini belanja berdasar klasifikasi ekonomi dibagi kedalam 4 kelompok yaitu belanja pegawai, barang jasa, modal dan lain-lain. (UU No. 33 Tahun 2004)

Tabel 1 : Pengeluaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur
(Periode 2006 – 2011)

| Tahun | Belanja Bantuan Sosial | Belanja Modal | Pembiayaan Daerah |
|-------|------------------------|---------------|-------------------|
| 2006 | 107631971,00 | 801847428,00 | 1221922350,00 |
| 2007 | 854686635,00 | 642101293,00 | 1587372539,00 |
| 2008 | 559004250,00 | 548509682,00 | 2595366864,00 |
| 2009 | 72471414,00 | 837299992,00 | 2286902536,00 |
| 2010 | 47627536,00 | 877876930,00 | 1769981099,00 |
| 2011 | 87714900,00 | 900462481,00 | 138525000,00 |

Sumber : Statisti Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur, BPS Provinsi Jawa Timur, 2006 - 2011

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa Pengeluaran Pemerintah ada yang mengalami penurunan dan peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam perencanaan pengeluaran belum mnunjukkan keprofesionalan perencanaan keuangan daerah dalam era Otonomi Daerah ini.

Pembangunan dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Pada hakekatnya, pembangunan harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya, untuk bergerak maju menuju

suatu kondisi kehidupan yang serba “lebih baik”, secara material maupun spiritual. Tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan ekonomi yang setinggitingginya, harus pula menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan tingkat pengangguran. Kesempatan kerja bagi penduduk atau masyarakat akan memberikan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Todaro, (2000).

Simon Kuznets menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh akumulasi modal (investasi pada tanah, peralatan, prasarana dan sarana dan sumber daya manusia), sumber daya alam, sumber daya manusia (human resources) baik jumlah maupun tingkat kualitas penduduknya, kemajuan teknologi, akses terhadap informasi, keinginan untuk melakukan inovasi dan mengembangkan diri serta budaya kerja. Todaro, (2000).

Tabel 2 : Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur
(Periode 2006-2011)

| Tahun | PDRB (ADHB) | Laju Pertumbuhan |
|-------|--------------|------------------|
| 2006 | 470627493,61 | 5,8 |
| 2007 | 536981881,91 | 6,11 |
| 2008 | 621391674,61 | 5,94 |
| 2009 | 686847557,72 | 5,01 |
| 2010 | 778565772,46 | 6,68 |
| 2011 | 884143574,81 | 7,22 |

Sumber : PDRB Jawa Timur, BPS Provinsi Jawa Timur, 2006 - 2011

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur, selama kurun waktu 2006 - 2011 secara umum mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari besarnya PDRB Provinsi Jawa Timur, berdasarkan harga berlaku rata-rata PDRB terus meningkat dengan diimbangi laju pertumbuhan ekonomi yang juga meningkat. Tahun 2011 adalah tahun yang paling mengalami laju Pertumbuhan yang Tinggi yaitu 7,22 %.

1.2 Perumusan Masalah

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa keuangan negara ada penerimaan dan pengeluaran. Sedangkan pengeluaran terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Adapun masalah pokok penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pengeluaran pembangunan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur ?
2. Berapakah porsi Pengeluaran Pembangunan Pemerintah yang efektif meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan membuktikan besarnya pengaruh pengeluaran pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur.
2. Menentukan porsi pengeluaran pembangunan yang efektif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan informasi dan masukan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam merumuskan kebijakan dan mencari solusi yang efektif terhadap pengelolaan keuangan daerah di Jawa Timur, utamanya dalam mengambil kebijakan pengeluaran pembangunan pemerintah.
2. Dapat dijadikan indikator untuk mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan terhadap kebijakan Pengeluaran Pembangunan dalam pengelolaan keuangan daerah yang diterapkan di Jawa Timur.